



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
INSTANSI PELAKSANA FUNGSI PENGADAAN DI LUAR LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan kepada peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan LKPP sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di LKPP perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) LKPP Tahun 2015;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INSTANSI PELAKSANA FUNGSI PENGADAAN DI LUAR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat LKPP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada instansi pelaksana fungsi pengadaan di luar LKPP;
b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
c. Melaporkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

KETIGA Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengarah LKPP;

- KEEMPAT Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2015;
- KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
- KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA
SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT INSTANSI
PELAKSANA FUNGSI
PENGADAAN DI LUAR LKPP

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 Juli 2015

SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INSTANSI
PELAKSANA FUNGSI PENGADAAN DI LUAR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	HONORARIUM (Rp)
1.	Anggota	1. Alexsander Pose Makin (LPSE Kota Tarakan)	500.000
		2. Deddy Saban (LPSE Kota Tarakan)	500.000
		3. Ruruh Sarwono (ULP Kota Tarakan)	500.000
		4. Kresna Makkulawu (ULP Kota Tarakan)	500.000
		5. Mahbub Junaidi (LPSE Provinsi Kalimantan Selatan)	500.000
		6. M Noor Fuady (LPSE Provinsi Kalimantan Selatan)	500.000
		7. Sugian Noor (ULP Provinsi Kalimantan Selatan)	500.000
		8. H Abriansyah Alam (ULP Provinsi Kalimantan Selatan)	500.000
		9. Agus Budi Arthana (LPSE Provinsi Bali)	500.000
		10. I Nyoman Adnyana Putra (LPSE Provinsi Bali)	500.000
		11. I Made Sukariawan Bandem (ULP Provinsi Bali)	500.000
		12. Ni Komang Sri Yuliadewi Kader (ULP Provinsi Bali)	500.000
		13. Burwani (LPSE Provinsi Kalimantan Barat)	500.000
		14. Dedy Shopiardi (LPSE Provinsi Kalimantan Barat)	500.000

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	HONORARIUM (Rp)
	Anggota	15. Yudha Riesdianto (ULP Provinsi Kalimantan Barat)	500.000
		16. Rofiqul Anwar (ULP Provinsi Kalimantan Barat)	500.000
		17. Nining Sulistiningsih (LPSE Kota Mataram)	500.000
		18. Abd. Manan (LPSE Kota Mataram)	500.000
		19. B. Yulia Kusumayanti (ULP Kota Mataram)	500.000
		20. Danang Cahyo Nugroho (ULP Kota Mataram)	500.000
		21. Yohanes Ahas (LPSE Kota Kupang)	500.000
		22. Jefry Steven Tan (LPSE Kota Kupang)	500.000
		23. Alshah Yaviana (ULP Kota Kupang)	500.000
		24. Tarsan Itarianus Riwu Djami (ULP Kota Kupang)	500.000
		25. M. Rudiansyah (LPSE Kota Pangkalan Bun)	500.000
		26. Jajang Sudrajat (LPSE Kota Pangkalan Bun)	500.000
		27. Andreas Adri Yudanto (ULP Kota Pangkalan Bun)	500.000
		28. Anita Arizona (ULP Kota Pangkalan Bun)	500.000
		29. Eko Purwanto (LPSE Kota Samarinda)	500.000
		30. Dody Novandi (LPSE Kota Samarinda)	500.000
		31. Syawaluddin Hasibuan (ULP Kota Samarinda)	500.000
		32. H. Ananta Fathurrozi (ULP Kota Samarinda)	500.000

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA